



Persepsi Masyarakat Kelurahan Tigabalata Kecamatan Jorlang Hataran mengenai Usulan Pemekaran Kabupaten Simalungun

Agung Suharyanto*, Armansyah Matondang, dan Syafruddin Ritonga

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Medan Area, Indonesia

Diterima Agustus 2017; Disetujui Oktober 2017; Dipublikasikan Desember 2017

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tentang Persepsi Masyarakat Kelurahan Tigabalata Kecamatan Jorlang Hataran Mengenai Usulan Pemekaran Wilayah Kabupaten Simalungun. Untuk mengungkapkan data tersebut, digunakan metode deskriptif yang bersifat kualitatif dan pencarian data informasi secara akurat di lapangan melalui teknik observasi partisipasi, wawancara, dan studi dokumen untuk dapat membaca dan mengkaji secara mendalam. Persepsi masyarakat adalah cara pandang dari sekelompok manusia yang tinggal bersama dalam wilayah tertentu dan memiliki perasaan, pemikiran serta aturan dan mereka memberikan pandangan, tanggapan dan penginderaan terhadap hal-hal atau peristiwa yang terjadi dilingkungannya melalui proses penglihatan atau interpretasi, melalui pengindraan terlebih dahulu. Persepsi masyarakat ini digunakan untuk mengungkap issue hangat tentang usulan pemekaran adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pembangunan ke wilayah yang selama ini tidak terjangkau dan menampung aspirasi masyarakat di wilayah yang menginginkan pelayanan yang sama dalam urusan pemerintahan. Di sisi lain, ada yang kontra terhadap usulan pemekaran, karena dianggap sebagai kendaraan politik dan membuat pengkotak-kotakan serta perpecahan masyarakat. Persepsi masyarakat di kelurahan Tigabalata Kecamatan Jorlang Hataran, adalah apatis terhadap pemekaran, karena jarak tempuhnya hanya 40 km ke Pematang Raya dan kehidupan mereka yang tidak berubah karena mata pencaharian mereka sebagian besar adalah petani padi dan hortikultura.

Kata Kunci: Persepsi Masyarakat, Pemekaran Wilayah, Kabupaten Simalungun

Abstract

This study examines the Community Perception of Tigabalata Sub-District of Jorlang Hataran Regarding the Proposed of Expansion of Simalungun Regency. To disclose the data, qualitative descriptive methods are used and accurate information search in the field through participant observation, interview, and document study techniques to be able to read and examine in depth. Public perception is the perspective of a group of humans who live together in a particular area and have feelings, thoughts and rules and they provide views, responses and senses to things or events occurring in their environment through the process of sight or interpretation, through sensory first. This public perception is used to reveal the warm issues about the proposed division is to realize the welfare of the community, the distribution of development to areas that have not been reached and accommodate the aspirations of people in the region who want the same service in government affairs. On the other hand, there is a cons against the usulan pemekaran, because it is considered as a political vehicle and make pengkotak-boxed and the split society. The perception of the community in Tigabalata sub-district of Jorlang Hataran sub-district is apathetic to pemekaran, because the distance is only 40 km to Pematang Raya and their life is unchanged because their livelihood is mostly rice farmers and horticulture.

Keywords: Public Perception, Expansion Area, Simalungun Regency

How to Cite: Suharyanto, A., Armansyah M., dan Syafruddin R., (2017). Persepsi Masyarakat Kelurahan Tigabalata Kecamatan Jorlang Hataran mengenai Usulan Pemekaran Kabupaten Simalungun, *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 9 (2): 177-185

*Corresponding author:

E-mail: agungsuaharyanto@staff.uma.ac.id

p-ISSN 2085-482X

e-ISSN 2407-7429

PENDAHULUAN

Era reformasi telah memberikan ruang yang lebih terbuka kepada masyarakat untuk mengembangkan dan membangun dirinya sendiri. Otonomi daerah, sebagai salah satu produk dari era reformasi, merupakan strategi untuk merespon tuntutan masyarakat untuk mengembangkan dan membangun dirinya sendiri. Hal ini memunculkan berbagai fenomena keinginan masyarakat pada berbagai wilayah untuk membentuk daerah otonom baru, baik daerah provinsi maupun kabupaten atau kota. Keinginan tersebut didasari terjadinya dinamika di daerah itu sendiri baik dinamika sosial, ekonomi, politik maupun budaya.

Sejalan dengan banyaknya keinginan untuk melakukan pembentukan daerah otonom baru, baik berupa pemekaran maupun peningkatan status, khususnya di daerah kabupaten dan kota sesuai dengan mekanisme pembentukan daerah otonom maka pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah no.129 tahun 2000. Peraturan pemerintah tersebut berisi tentang persyaratan Pembentukan dan Kriteria pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah, yang isinya antara lain menyebutkan persyaratan, kriteria, prosedur, pembiayaan pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah.

Pembentukan daerah otonom ini, diharapkan mampu memanfaatkan peluang yang lebih besar dalam mengurus rumah tangganya sendiri, terutama dalam kaitannya dengan sumber-sumber pendapatan asli daerah, sumber daya alam dan pengelolaan bantuan pemerintah pusat kepada daerah otonom dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat setempat lebih baik. Seiring dengan pergeseran model tersebut, terjadi pula pergeseran dari penekanan aspek sentralisasi kepada penekanan aspek desentralisasi. Sistem pemerintahan yang ada di era otonomi daerah saat ini dengan asas desentralisasi merupakan suatu refleksi proses reformasi sosial, ekonomi, politik maupun budaya di Indonesia memiliki kecenderungan dan pergeseran pelayanan

publik dari wewenang pemerintah pusat menjadi kewenangan pemerintahan daerah yang lebih dekat dengan masyarakatnya. Dalam perspektif otonomi daerah ini, kekuasaan akan terbagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang secara legal konstitusional tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Seiring dengan perkembangan dinamika di berbagai daerah dan peraturan pendukung yang ada, masyarakat Simalungun yang diwakili oleh beberapa tokoh masyarakat dan politik juga mengajukan pembentukan daerah otonomi tersendiri. Hal ini terjadi karena melihat peraturan perundang-undangan mengenai pemerintahan daerah yang berlaku saat ini (Undang-undang No.32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah no.129 Tahun 2000), sedemikian memberikan kemungkinan untuk dilakukannya pemekaran satu daerah otonom menjadi beberapa daerah otonom baru. Hal ini juga menegaskan komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia ini yang memberikan ruang bagi terpeliharanya warisan sejarah dan kultur dari sebuah daerah seperti Kabupaten Simalungun yang senama dengan etnis Simalungun sebagai penduduk aslinya.

Selain dari peraturan perundang-undangan tersebut, juga adanya wilayah yang terlalu luas dan banyaknya kecamatan untuk dikelola dalam satu wilayah pemerintahan. 31 (tiga puluh satu) Kecamatan yang terdiri dari di wilayah Kabupaten Simalungun tersebut, dimekarkan menjadi 2 (dua) Kabupaten dengan pembagian 16 (enambelas) Kecamatan tetap di kabupaten induk dan 15 (limabelas) Kecamatan di kabupaten pemekaran. Pemekaran Kabupaten Simalungun tersebut menjadi wajar dengan harapan akan membawa berbagai keuntungan bagi masyarakat, seperti fasilitas sosial, ekonomi dan finansial untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat pada masa depan bagi daerah yang baru dimekarkan.

Kabupaten induk Simalungun yang beribu kota di Pematang Raya, terdiri dari 16 (enambelas) Kecamatan, yaitu: Kecamatan Raya, Purba, Haranggaol Horisan, Haranggaol, Dolok Panribuan, Dolok Pardamaean, Girsang Sipanganbolon, Sidamanik, Pematang

Sidamanik, Panombean Panei, Panei, Raya Kahean, Dolok Silau, Silimakuta, Pematang Silimahuta dan Jorlang Hataran. 15 (limabelas) Kecamatan lainnya nantinya di kabupaten pemekaran yang beribukota di Perdagangan, yaitu: Siantar, Gunung Maligas, Gunung Malela, Tapan Dolok, Dolok Batu Nanggar, Bandar Huluan, Bandar Masulam, Pematang Bandar, Bandar, Bosar Maligas, Ujung Padang, Hutabayu Raja, Jawa Maraja Bahjambi, Tanah Jawa dan Hatonduhan.

Melihat hal ini, maka saya tertarik untuk meneliti persepsi masyarakat Kelurahan Tigabalata Kecamatan Jorlang Hataran terhadap upaya pemekaran Kabupaten Simalungun. Jarak lokasi kelurahan ini ke ibukota Pematang Raya, sekita 40 km. Masyarakat Tiga Balata mempunyai persepsi yang apatis terhadap usulan pemekaran Kabupaten Simalungun yang apabila berhasil, akan tetap beribukota Pematang Raya.

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian di Kelurahan Tigabalata Kecamatan Jorlang Hataran tentang persepsi masyarakat mengenai pemekaran wilayah Kabupaten Simalungun tempat dimana penelitian itu dilakukan, dengan pertimbangan bahwa lokasi tersebut sesuai dengan rumusan masalah dan jenis penelitian.

Berdasarkan tujuan penelitian ini yaitu, untuk mengidentifikasi, mengeksplorasi dan menganalisis masyarakat Kelurahan Tigabalata Kecamatan Jorlang Hataran mengenai pemekaran wilayah Kabupaten Simalungun. Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif untuk menganalisis pemekaran wilayah Kabupaten Simalungun.

Menurut Koentjaraningrat (1997: 29) bahwa: "Penelitian yang bersifat deskriptif menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, atau gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain".

Menurut Bodgan & Taylor (1975: 5) dalam Moleong (2000: 4) mendefenisikan: "Metodologi kualitatif sebagai prosedur

penelitian akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau pelaku yang diamati".

Dengan demikian, peneliti tertarik untuk menganalisis persepsi masyarakat Kelurahan Tigabalata Kecamatan Jorlang Hataran mengenai pemekaran wilayah Kabupaten Simalungun dengan menggunakan metode kualitatif untuk mengetahui dan mendapatkan data secara ilmiah. Dan untuk memahami dan mendeskripsikannya, peneliti menggunakan studi lapangan (*field research*) dengan observasi partisipasi (*participant observer*) yaitu peneliti langsung ke lapangan untuk melakukan pengamatan pada subjek penelitian.

Instrumen pengumpul data terbagi menjadi dua yakni untuk data primer dengan menggunakan wawancara langsung kepada masyarakat Kelurahan Tigabalata Kecamatan Jorlang Hataran. Wawancara ini dilakukan dengan *indepht interview* yaitu metode pengumpulan data melalui wawancara langsung yang dilakukan secara mendalam kepada sumber data. Adapun untuk data sekunder dari telaah berbagai literatur yang relevan dengan penelitian.

Untuk mendapatkan hasil yang akurat dan untuk kebenaran data maka penelitian harus memiliki teknik pengumpulan data, setidaknya ada tiga teknik pengumpulan data yaitu, observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Observasi atau pengamatan secara langsung yang dilakukan untuk mengamati suatu gejala sosial tertentu di lokasi penelitian yang meliputi keadaan, kegiatan, peristiwa, perilaku yang melibatkan informan dan pastinya berhubungan dengan persepsi masyarakat Kelurahan Tiga Balata Kecamatan Jorlang Hataran pemekaran wilayah Kabupaten Simalungun. Hal ini dilakukan agar dapat menghasilkan data sesuai realitas dan valid.

Teknik wawancara dilakukan peneliti diawali terlebih dahulu dengan interview. Hal ini dilakukan di awal pertemuan dengan tujuan untuk membangun hubungan interpersonal antara peneliti dengan informan, karena dengan membangun hubungan interpersonal maka akan terjalin rasa kepercayaan dan keterbukaan dalam perbincangan pada saat wawancara.

Kemudian inisial interview juga bertujuan untuk memperoleh informasi lebih mendalam tentang informan dan juga untuk memberitahu kepada informan mengenai sistem wawancara yang akan dilakukan.

Teknik analisis data yang digunakan adalah, pertama adalah dengan reduksi data (*Data Reduction*), yaitu data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Sebab semakin lama penelitian semakin banyak jumlah data dan akan semakin kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data atau merangkum data dengan memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk pengumpulan data selanjutnya.

Kedua adalah penyajian data (*Data Display*). Menurut Miles dan Huberman (2002) dalam Sugiyono (2009:341) bahwa: "Apabila data telah direduksi maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, yang paling sering digunakan untuk penyajian data adalah data teks yang bersifat naratif". Dengan menyajikan data kualitatif dan menentukan jenis serta bentuk data yang dimaksudkan ke dalam uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, sehingga lebih mudah dipahami.

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dari himpunan seluruh data selama penelitian. Kesimpulan merupakan tinjauan terhadap catatan yang telah dilakukan di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Tinjauan ulang pada pencatatan di lapangan ataupun kesimpulan yang dapat di tinjau sebagai makna yang muncul dari data yang harus di uji kebenarannya.

Keempat adalah teknik pencermatan kesahihan data, yaitu ini dilakukan *member check* berkenaan dengan temuan-temuan pada akhir penelitian kemudian dilakukan penilaian akhir oleh konsultan dengan terlebih dahulu diseminarkan dan didiskusikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kecamatan Jorlang Hataran, adalah satu dari 30 kecamatan, plus 9 kecamatan hasil pemekaran, serta 17 kelurahan dan 294 desa/Nagori dengan luas areal 109,25 KM2 dari 4.386,60 Km2 luas seluruh kabupaten Simalungun. Kecamatan Jorlang hataran terletak pada ketinggian: 600 M. diatas permukaan laut. Pada masa-masa hangatnya issue pemekaran sekitar tahun 2007, kabarnya arealnya di perluas dengan masuknya beberapa nagori dari kecamatan tetangga seperti dari kecamatan Siantar.

Ada 13 Huta/Kelurahan di Kecamatan Jorlang Hataran yaitu:

No	Huta/Kelurahan	Kabupaten	Provinsi
1	Bah Birong Ulu	Simalungun	SumateraUtara
2	Bah Sampuran	Simalungun	SumateraUtara
3	Dipar Hataran	Simalungun	SumateraUtara
4	Dolok Marlawan	Simalungun	SumateraUtara
5	Dolok Parriasan	Simalungun	SumateraUtara
6	Jorlang Hataran	Simalungun	SumateraUtara
7	Kasindir	Simalungun	SumateraUtara
8	Pagar Pinang	Simalungun	SumateraUtara
9	Panombean Huta Urung	Simalungun	SumateraUtara
10	Parmonangan	Simalungun	SumateraUtara
11	Pinang Ratus	Simalungun	SumateraUtara
12	Sibunga Bunga	Simalungun	SumateraUtara
13	Tiga Balata	Simalungun	SumateraUtara

Desa Tiga Balata, Pusat pemerintahannya sendiri di pusatkan di Tiga Balata, dengan luas 12.08.06.1008 dan Batas-batas wilayah: Sebelah Utara Kecamatan Siantar; Sebelah Selatan Kecamatan Dolok Pangaribuan; Sebelah Barat Kecamatan Sidamanik; dan Sebelah Timur Kecamatan Tanah Jawa

Jumlah penduduk daerah penelitian dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel Jumlah Penduduk Kelurahan Tiga Balata

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1.	Laki-laki	1599	49,44
2.	Perempuan	1635	50,55
	Jumlah	3.234	100

Sumber: *Profil Kelurahan Tiga Balata Tahun 2017*

Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa di Kelurahan Tiga Balata jumlah penduduk wanita lebih banyak daripada laki-laki yaitu 50,55% dibandingkan laki-laki hanya 49,44% dari jumlah penduduk.

Tabel Distribusi Penduduk Menurut Umur di Kelurahan Tiga Balata

No	Umur (Tahun)	Jumlah Jiwa	Persentase
1.	0-6	341	
2.	7-12	391	12,09
3.	13-15	275	8,5
4.	16-18	265	8,19
5.	19-21	181	5,59
6.	22-45	950	29,37
7.	>46	831	25,69
	Jumlah	3234	100

Sumber: *Profil Kelurahan Tiga Balata Tahun 2017*

Berdasarkan Tabel tersebut diketahui bahwa jumlah penduduk Kelurahan Tiga Balata paling banyak pada kelompok umur 22-45 yaitu 950 jiwa atau 29,37%, sedangkan yang paling sedikit adalah yang berada pada kelompok umur 19-21 yaitu 181 jiwa atau 5,59%.

Tabel 8. Data Penduduk Yang Drop Out/ Putus Sekolah

No	Drop Out/Putus Sekolah	Jumlah
1.	SD	121
2.	SMP sederajat	146
3.	SMU sederajat	203
	Total	470

Sumber: *Profil Kelurahan tahun 2017*

Dari tabel tersebut dapat dilihat jumlah penduduk yang drop out/ putus sekolah adalah pada jenjang SMU sederajat, hal ini disebabkan oleh kenakalan remaja itu sendiri ataupun kurangnya biaya pendidikan dari keluarga yang bersangkutan.

Tabel 9. Distribusi Penduduk Menurut Pekerjaan di Kelurahan Tiga Balata

No	Uraian	Jumlah (KK)
1.	Petani	522
2.	Pegawai	219
3,	Lain-lain	102
		843

Sumber: *Profil Kelurahan tahun 2017*

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa pekerjaan yang paling dominan di Kelurahan Tiga Balata adalah sebagai petani yaitu 522 KK atau 61,92%.

Tiga Balata, sebagai kelurahan sekaligus Ibukota kecamatan dilengkapi dengan berbagai sarana dan pra sarana, Pendidikan dari TK, SD, SMP hingga SMU (SMA dan SMK), bahkan SD plus Tigabalata adalah salah satu Sekolah dasar yang berstandar internasional (SBI) di Kab. Simalungun. Kesehatan dengan Puskesmas, Klinik yang dilengkapi Doter tetap, Bidan dan Perawat, Jaringan Telokomunikasi yang lengkap, Kantor Pos, Sarana Sosial seperti tempat Ibadah Gereja dan Mesjid, Sarana Pertanian dengan Irigasi yang sudah dibangun bahkan sejak zaman belanda dulu.

Secara umum pemekaran daerah di Indonesia sering terkait dengan retorika yang selalu menyebutkan alasan Pemekaran wilayah untuk mendekatkan pemerintah dengan rakyat, bahwa akan menguntungkan secara ekonomis dan itu adalah kehendak rakyat untuk memiliki daerah sendiri. Kabupaten baru akan memiliki birokrasi sendiri dengan anggaran yang akan dialokasikan menurut prioritas - prioritas sendiri yang menjanjikan kemakmuran bagi warga masyarakat di daerah yang dimekarkan.

Pemekaran wilayah juga merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kemampuan pemerintahan daerah dalam memperpendek rentang kendali pemerintahan sehingga meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan pembangunan Pemekaran Simalungun memang masih ditunda pembahasannya dan akan dilanjutkan oleh DPR RI yang baru Periode 2014-2019.

Pemekaran kabupaten Simalungun memang masih ditunda pembahasannya dan akan dilanjutkan oleh DPR RI yang baru periode 2014-2019. Banyak pro dan kontra dalam pemekaran Kabupaten Simalungun tersebut, misalnya saja yang menamakan dirinya TPS dengan alasan permainan politik saja, memecah Simalungun dan lain-lain dengan mengkambinghitamkan kinerja Bupati sekarang yang sedang menjabat. Akan tetapi apabila dilihat tujuan awal bahwa adanya pemekaran adalah untuk Peningkatan pelayanan Administrasi terhadap Masyarakat dan Syaratnya adalah berdasarkan PP nomor 78 tahun 2007.

Alasan pemekaran Kabupaten Simalungun diatas menunjukkan bahwa semua alasan pemekaran dari para tokoh masyarakat nyaris seragam yaitu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pemekaran Simalungun Hataran akan membawa kemakmuran bagi masyarakat, pembangunan akan meningkat, pelayanan masyarakat akan lebih baik. Dengan terbentuknya daerah otonom baru, secara teoritis wilayah administrasi pemerintahan akan semakin mengecil, sehingga memberikan kesempatan yang besar bagi setiap komponen masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam menentukan arah dan kebijakan daerah. Dengan demikian tujuan akhir dari pemekaran tersebut dapat tercapai yaitu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi, dan percepatan pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah.

Masyarakat melihat adanya potensi wilayah daerah yang dimekarkan. Masyarakat juga beranggapan dengan adanya pemekaran Simalungun nantinya akan meningkatkan pelayanan publik dan percepatan pembangunan. Harapan ini juga yang diinginkan oleh elit politik lokal pendukung pemekaran Simalungun Hataran baik level daerah maupun pusat. Banyak pro dan kontra dalam upaya pemekaran Kabupaten Simalungun tersebut, misalnya saja yang menamakan dirinya TPS dengan alasan Permainan politik saja, memecah

Simalungun dan lain-lain dengan mengkambinghitamkan kinerja Bupati sekarang yang sedang menjabat. Akan tetapi apabila dilihat tujuan awal bahwa adanya pemekaran adalah untuk Peningkatan pelayanan Administrasi terhadap Masyarakat dan Syaratnya adalah berdasarkan PP nomor 78 tahun 2007.

Ada beberapa pendapat yang mengungkapkan bahwa pemekaran wilayah Simalungun Hataran nantinya dapat segera mewujudkan kemakmuran bagi rakyat, tentunya bertujuan sangat baik karena untuk percepatan pemerataan pembangunan dan memudahkan masyarakat menuju kesejahteraan, termasuk dalam hal pelayanan oleh pemerintah daerah. Kabupaten Simalungun layak dimekarkan apabila dilihat dari jumlah penduduk dan letak geografisnya dan merupakan wujud dari aspirasi bersama di semua lapisan masyarakat, sehingga mempercepat pembangunan secara merata dan menyentuh kepentingan masyarakat.

Pemekaran adalah murni aspirasi masyarakat, karena pemekaran bukan untuk kepentingan pribadi, atau golongan namun untuk memajukan pembangunan dibidang infrastruktur, budaya dan pendidikan yang berguna bagi masyarakat banyak. Dengan adanya pemekaran Simalungun, di sana akan lebih diserap banyak pengangguran menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pemekaran adalah membuat proses demokrasi lebih cepat terjadi tujuan pemekaran adalah untuk mensejahterahkan rakyat melalui pemerataan pembangunan baik infratruktur dan pemekaran juga akan mempercepat perkembangan ekonomi yang semakin cepat.

Ada juga yang berpendapat bahwa pemekaran wilayah kabupaten simalungun menjadi dua itu tidak pas, karena hanya sebagai kendaraan politik bagi elit-elit politik saja. Dengan menjual isu pemekaran daerah secara tidak sistematis di masa Pemilu saat ini menunjukkan bagaimana masa depan daerah dan masyarakatnya, dipertaruhkan oleh para politisi atau calon bupati yang mungkin sebagian kurang berwawasan kenegaraan dan tidak mempunyai kompetensi atau

keahlian yang cukup untuk menentukan suatu daerah layak atau tidak untuk dimekarkan. Di sisi lain, pemekaran Kabupaten Simalungun tersebut akan menyebabkan kesenjangan sosial. Pemekaran hanya akan menyebabkan pengkotak-kotakan sosial masyarakat dengan pemisahan etnis dan agama. Untuk agama dan etnis tertentu, berada di wilayah-wilayah tertentu, karena sebetulnya Indonesia adalah multikultural.

Masyarakat Kelurahan Tigabalata Kecamatan Jorlang Hataran, agak lain dengan masyarakat di daerah lain, karena bersifat apatis terhadap pemekaran yang terus santer digaungkan. Bagi mereka, hal tersebut tidak begitu berpengaruh terhadap pendapatan dan penghasilan sehari-hari, karena jarak ke Pematang Raya sejauh 40 Km. Terutama juga karena lebih dari 60 % adalah petani, baik petani yang bercocok tanam padi maupun tanaman hortikultura, tentu tidak terpengaruh dengan pemekaran. Selain itu juga kelurahan Tiga Balata berada di kecamatan Jorlang Hataran dan berada tetap beribu kota Pematang Raya.

Bagi masyarakat yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dan bekerja di Pemerintahan Kabupaten Simalungun, berpendapat bahwa dengan adanya pemekaran ataupun tidak, mereka juga tetap berada di pemerintahan. Jika terjadi pemekaran menjadi dua kabupaten yang beribukota Pematang Raya dan Pematang Bandar, tidak begitu menjadi masalah oleh karena persoalan jarak.

Misalnya, Imelda Tambunan, ST., M.Si., seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemkab Simalungun (32 tahun), yang berdomisili di Kelurahan Tiga Balata, mengungkapkan bahwa dirinya tidak begitu berpengaruh terhadap pendapatan dan penghasilan sehari-hari sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS), makanya tidak terlalu berpendapat ketika diwawancarai mengenai pemekaran.

Pendapat tersebut di atas menjadi agak berbeda dengan Agus Salim Damanik (56 tahun), yang merupakan pemilik kios toko kelontong yang berada di pinggir jalan lintas Medan - Danau Toba. Dari sisi pendapatan untuk kehidupan sehari-hari, pendapatannya

sama saja, walaupun ada pemekarana kabupaten Simalungun. Beliau juga tidak khawatir karena untuk permasalahan pengurusan surat-surat tidak begitu jauh karena berjarak 40 km dari Tiga Balata ke Pematang Raya.

Haji Idris Siregar (74 tahun), adalah seorang tokoh masyarakat di Kecamatan Jorlang Hataran, yang tidak begitu risau apakah pemekaran itu berhasil ataukah tidak, karena Kecamatan Jorlang Hataran tetap menjadi bagian dari Kabupaten Induk yang beribukota Pematang Raya. Selain itu, juga tidak begitu berpengaruh terhadap pendapatan dan penghasilan sehari-hari.

Haji Salim Siregar (57 tahun) Tokoh Masyarakat di Kecamatan Jorlang Hataran, juga tidak begitu risau apakah pemekaran itu berhasil ataukah tidak, karena Kecamatan Jorlang Hataran tetap menjadi bagian dari Kabupaten Induk yang beribukota Pematang Raya. Selain itu, juga tidak begitu berpengaruh terhadap pendapatan dan penghasilan sehari-hari sebagai petani hortikultura. Hal ini juga sama seperti yang diungkapkan oleh Agus Salim Damanik (56 tahun) Tokoh Masyarakat di Kecamatan Jorlang Hataran

SIMPULAN

Beragam pendapat dari masyarakat mengenai usulan pemekaran wilayah Kabupaten Simalungun, yaitu ada yang pro pemekaran (terutama dari masyarakat Simalungun Bawah), kontra pemekaran (masyarakat Simalungun Atas) dan apatis (terutama di beberapa kecamatan yang jaraknya tidak terlalu jauh dari ibu kota kabupaten). Motivasi pemekaran Kabupaten Simalungun menjadi dua yaitu Simalungun Bawah (Hataran) dan Simalungun Atas (Induk) adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pembangunan ke wilayah yang selama ini tidak terjangkau dan menampung aspirasi masyarakat di wilayah yang menginginkan pelayanan yang sama dalam urusan pemerintahan. Persepsi masyarakat di kelurahan Tigabalata Kecamatan Jorlang Hataran, adalah apatis terhadap usulan

pemekaran wilayah Kabupaten Simalungun. Penyebabnya adalah karena jarak tempuhnya hanya 40 km ke Pematang Raya dan mereka beranggapan, bahwa kehidupan ekonomi tidak berubah karena sebagian besar masyarakat bermata pencaharian mereka sebagai petani padi dan hortikultura.

DAFTAR PUSTAKA

- Susanto, A.B., dkk. (2010). *Reinvensi Pembangunan Ekonomi Daerah, Bagaimana Membangun Kesejahteraan Daerah*. Jakarta. Erlangga. PT. Gelora Aksara Pratama.
- Bungin, B, 2001. *Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga University Press.
- _____, 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Budiarjo, M, 1991, *Aneka pemikiran Tentang Kuasa dan Wibawa*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Haloho, M. 2006. *Orientasi Pemilih Etnik Jawa Dalam Pilkadaung Tahun 2005 Di Kota Medan* (Tesis). Medan. Program Pasca Sarjana UNIMED.
- Harriss, J, dkk diterjemahkan oleh Arya Wisesa, 2005, *Politisasi Demokrasi: Politik Lokal Baru*, Demos, Jakarta
- Haryanto, 1990, *Elit, Massa Dan Konflik*, Pusat Antar Universitas-Studi sosial, UGM, Yogyakarta.
- Ihromi, T.O. 1981. *Pokok-pokok Antropologi Budaya*. Jakarta: Gramedia.
- Imawan, R, 2003, "*Catatan Kritis Pelaksanaan Otonomi Tingkat Desa di Bali*", dalam Karim (ed) (2003) *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Irtanto, 2008, *Dinamika Politik Lokal Era Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Jalaluddin R, 2003. *Psikologi Komunikasi*. Remaja Rosdakarya: Bandung. Makmuri Muchlas.2008.*Perilaku Organisasi*.Yogyakarta.Gadjah Mada University Press
- Khairin, Sukri, 2005, *Etnis Alas dalam Otonomi daerah: Kajian Aktualisasi Identitas Kelompok melalui Pemekaran Desa di Kabupaten Aceh Tenggara*, Tesis, Program Studi Antropologi Sosial Pascasarjana UNIMED.
- Kusmanto, H., (2013). *Peran Badan Permusyawaratan Daerah dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat*. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, 1 (1): 41-47.
- Koentjaraningrat, 1961, *Metode-Metode Antropologi dalam Penyelidikan Masyarakat dan Kebudayaan di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Universitas.
- _____. 1987. *Sejarah Antropologi I*. Jakarta: UI Press.
- _____. 1990. *Sejarah Antropologi II*. Jakarta: UI Press.
- _____. 1992. *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*. Jakarta: Dian Rakyat.
- _____, 1981. *Sejarah Teori Antropologi I*. Jakarta: UI Press
- _____, 1997, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia
- Kriyantono, R. 2006, *Teknis Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Liliweri, Alo, WS, 2001, *Gatra-Gatra Komunikasi Antar Budaya*, Yogyakarta, Penerbit Pustaka Pelajar. 2001,
- Lubis, E, 1996, *Peran Serta Masyarakat Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Simalungun (Skripsi)*, Universitas Negeri Medan.
- _____, 2014, *Studi Antropologi Pemekaran Wilayah Kabupaten Simalungun*, Universitas Negeri Medan
- Mansoben, J.R., tt., *Sistem Politik Tradisional di Irian Jaya*, Jakarta: LUPI_RUL Series.
- Mas'oe'd, M dan Colin M.A., 2006, *Perbandingan Sistem Politik*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Meleong, J.L., 2000, *Memahami Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- _____, 2000, *Metodologi Penelitian Kualitatif*; Rosda Karya, Bandung
- Nurhasim, M. (ed.), 2005, *Konflik Antar Elit Politik Lokal dalam Pemilihan Kepala Daerah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Poerwadarrninta, WJS, 1985, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Priyono, H., 2000, *Anthony Giddens: Suatu Pengantar*, Jakarta; KPG (Kepustakaan Populer Gramedia)
- Ritzer, G. dan Douglas J.G., 2008, *Teori Sosiologi: Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir*, terjemahan Nurhadi. Yogyakarta; Kreasi Wacana.
- Sangti, B., 1977. *Sejarah Batak*, Balige: Karl Sianipar Company.
- Saragih, S., 2008. *Orang Simalungun*, Depok: CV Citama Vigora.

- Simanjuntak, B.A. 2002. Konflik Status dan Kekuasaan Ratak Toba., Yogyakarta. Jendela Sihaloho, Misran, 2006.
- Simorangkir, A.K., 2009, Gejolak Batubara: Studi Antropologi Tentang Konflik Pembentukan Kabupaten Batubara. Tesis Program Studi Antropologi Sosial Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Medan.
- Sinar, T.L., 1973, Sari Sedjarah Serdang (Jilid III), Medan: Ikatan Keluarga Serdang.
- Siswanto, S., (2005). *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Jakarta. PT. Sinar Grafika.
- Spradley, J, 1997, *Metode Etnografi*, Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Suharyanto, A., (2014). Partisipasi Politik Masyarakat Tionghoa dalam Pemilihan Kepala Daerah, *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, 2 (2): 166-175
- Susi S dan Adelita L., (2015). Partisipasi Politik Perempuan pada Partai Keadilan Sejahtera Kota Medan, *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, 3 (1): 1-3.
- Tampubolon, Hotmaria, 2010, *Pengaruh Pemekaran Wilayah terhadap Persaingan Politik Antar Kelompok Etnis Nias di Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara*, Tesis, Program Studi Antropologi Sosial Pascasarjana UNIMED.
- Tideman, J, 1922, *Simeloengoen: Het Land Der Timoer batak in zijn ontwikkeling tot Een Deel Van het Culturgebied van de Ooskust van Sumatera*, Leiden: Stamdruskerij Louis H. Beehrer.
- Walgito, B., 2002. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta. Andi Offset
- Undang Undang Nomor 22/1999, Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang Undang Nomor 32/2004, Tentang Pemerintahan Daerah, CV. Eko Jaya, Jakarta.
- Varma, S.P, 2001, *Teori Politik Modern*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada Jakarta.